

**DESKRIPSI TENTANG AKIBAT HUKUM DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM  
DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR : 28/PUU-XX/2022**

**INTISARI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana**



**OLEH :**

**MARTHEN YOPI**

**20310219**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KUPANG**

**2023**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto.M.P.Ekon, S.H., M.Hum  
NIDN. 0830057401

Pembimbing II



Rian M.F.Kapitan, S.H., M.H  
NIDN. 0812128801

## MENGESAHKAN

Rektor Universitas Kristen  
Artha Wacana Kupang


Prof.Dr.Ir.Godlief Fredik Neonufa.MT.,  
NIDN: 0817016801

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr.Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum  
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

**BERITA ACARA**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal Dua Puluh Bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Marthen Yopi  
NIM : 20310219  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Akibat Hukum Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Putusan Sela Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022

**PANITIA PENGUJI**

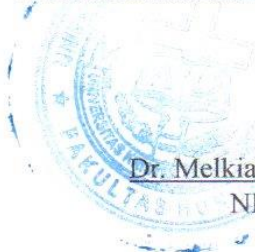
Ketua : Dr. Yanto.M.P.Ekon, S.H., M.Hum  
Sekretaris : Rian V.F.Kapitan, S.H., M.H  
Anggota: 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum  
2. Soleman Kette, S.H., M.Hum  
3. Tontji Ch Rafael, S.H., M.H

**TANDA TANGAN**

( )  
( )  
( )  
( )  
( )

Kupang, 20 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0822106401

## INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Akibat Hukum Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Putusan Sela Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana. Variabel terikat adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 28/PUU-XX/2022.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana adalah :

1. Penuntut Umum melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan sesuai putusan sela.
2. Dakwaan dilimpahkan ke pengadilan hanya satu kali.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah Diharapkan bagi Penuntut Umum, dalam menyusun surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan agar terhindar dari pembatalan surat dakwaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Diharapkan bagi Penuntut Umum, untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dakwaan dilimpahkan ke pengadilan hanya satu kali, sehingga dakwaan harus diperbaiki secara baik dan benar dan diajukan ke pengadilan.

***Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Dakwaan, Putusan Sela***

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Mukthie Fadjar, '2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*', Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Edisi 1, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit : Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- H. Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pusot Penerbit dan Percetakan UNAIR ) Airlonggo University
- Hadari Djenawi Tahir, 1981, Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Penerbit : PT. Aditya Bakti
- Solmin, Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normati : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers*
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal :

- Dian Heny *Nastuti*, Analisis Akibat Hukum Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT), Jurnal Verstek Vol. 9 No. 1 ( Januari – April 2021 ) Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Wilhelmus Taliak, Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Filemon Ketaren, Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 7 Issue 1, Februari 2023.

Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011.

Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014

Winarno Budyatmojo, Dinda Agustin Wulandari, Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* / Volume 1, Nomor 4, Year 2022

Ni'matul Huda, Sri Hastuti Puspitasari, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 19 Juli 2012

Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding), *Jurnal Solusi* Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

Fista Prilia Sambuari, Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.